

NILAI-NILAI TRADISI LISAN DALAM BUDAYA JAWA

oleh: Soehardi

Pendahuluan

Dalam rangka pembinaan kebudayaan daerah, Direktorat Sejarah dan Nilai Tradisional yang bekerja sama dengan Kanwil Depdikbud Propinsi DIY menyelenggarakan diskusi dan peragaan tradisi lisan. Realisasi program-program ini merupakan amanat yang dituangkan dalam UUD 1945 pasal 32 yang menyatakan bahwa pembinaan dan pengembangan kebudayaan daerah bertujuan untuk mengembangkan kebudayaan nasional Indonesia. Juga diamanatkan bahwa pembinaan di bidang kebudayaan diarahkan untuk memberikan wawasan budaya dan makna pada pembangunan nasional dalam segenap dimensi kehidupan bermasyarakat, untuk meningkatkan harkat dan martabat jatidiri dan kepribadian bangsa.

Berkaitan dengan program itu, artikel ini akan memaparkan gagasan-gagasan tentang makna nilai-nilai budaya daerah yang sekiranya dapat menyumbang terbentuknya jatidiri bangsa atau identitas bangsa Indonesia dalam wacana globalisasi hubungan-hubungan antarbangsa-bangsa di dunia. Sesuai dengan arah tema itu, pembahasan dalam tulisan ini dipusatkan pada tradisi lisan. Tradisi lisan di Jawa merupakan salah satu cara bagaimana pengetahuan budaya diwariskan dari generasi tua kepada generasi muda, seperti dongeng anak-anak permainan anak-anak, tembang *macapat*, ungkapan peribahasa, dan juga pentas wayang kulit purwa. Dalam artikel ini hanya akan dibahas nilai-nilai budaya yang tercantum dalam idiom-idiom ungkapan Jawa dan pentas wayang kulit purwa¹, yang sekiranya dapat diangkat sebagai salah satu unsur budaya pembentuk kebudayaan nasional. Harapannya adalah agar nilai-nilai filosofis dan etika-moral yang terkandung dalam tradisi lisan budaya Jawa itu dapat direvitalisasi dan diintegrasikan dalam konstelasi budaya nasional melalui pendidikan budi pekerti dan pentas wayang.

¹ Di sini pentas Wayang Kulit Purwa dapat dikategorikan sebagai bagian dari tradisi lisan, karena dalam pentas itu *dhalang* menuturkan jalan cerita sebuah lakon secara lisan kepada penonton.

Dalam konteks itu, maka dalam seksi-seksi berikut akan dibahas kerangka konseptual nilai budaya daerah. Dalam tema ini akan dibahas Budaya Jawa sebagai landasan berpijak, untuk itu di sini akan dianalisis makna-makna nilai budaya itu serta akan dilakukan penafsiran apakah hakikat nilai-nilai budaya tersebut dapat berlaku lebih umum, tidak saja dianut oleh orang Jawa saja, tetapi dapat dipahami dan dianut oleh masyarakat Bangsa Indonesia secara keseluruhan.

Kerangka Konseptual

“Sistem nilai budaya adalah suatu rangkaian konsepsi-konsepsi abstrak yang hidup dalam alam pikiran sebagian besar dari warga suatu masyarakat, mengenai apa yang dianggap mempunyai makna penting dan berharga, tetapi juga mengenai apa yang dianggap remeh dan tidak berharga dalam hidup” (Koentjaraningrat, 1969: 18). Dalam kehidupan bermasyarakat, sistem nilai ini berkaitan erat dengan sikap, di mana keduanya menentukan pola-pola tingkah laku manusia. Sistem nilai adalah bagian terpadu dalam etika-moral, yang dalam manifestasinya dijabarkan dalam norma-norma sosial, sistem hukum dan adat sopan-santun yang berfungsi sebagai tata kelakuan untuk mengatur tata-tertib kehidupan bermasyarakat. Adat-istiadat menetapkan bagaimana seharusnya warga masyarakat bertindak secara tertib.

Nilai budaya daerah tentu saja bersifat partikularistik, artinya khas berlaku umum dalam wilayah budaya suku bangsa tertentu. Sejak kecil “individu-individu telah diresapi oleh nilai-nilai budaya masyarakatnya, sehingga konsepsi-konsepsi itu telah menjadi berakar dalam mentalitas mereka dan sukar untuk digantikan oleh nilai budaya yang lain dalam waktu yang singkat” (Koentjaraningrat, 1969: 18). Sehubungan dengan itu, di dalam manifestasinya secara konkret nilai budaya itu mencerminkan stereotip tertentu, misalnya orang Jawa diidentifikasi sebagai orang-orang yang santun, bertindak pelan-pelan, *lembah manah* (*low profile*), halus tutur katanya dan sebagainya. Kekhasan nilai budaya daerah dan perilaku praktisnya itu tentu saja secara relatif berbeda dengan kekhasan nilai budaya suku bangsa lain, misalnya stereotip orang Jawa tadi tentu berbeda dengan stereotip orang Batak atau Bugis-Makasar.

Permasalahan yang muncul adalah nilai budaya daerah yang bagaimana yang juga dapat berfungsi membentuk struktur nilai budaya umum yang dapat berlaku bagi masyarakat-masyarakat di Indonesia secara keseluruhan, sehingga dapat menjadi ciri identitas jati diri Bangsa Indonesia. Pemecahan masalah ini tentu saja memerlukan telaah nilai budaya daerah yang memiliki potensi untuk itu.

Bangunan masyarakat Indonesia terbentuk dari hubungan-hubungan antar warga-warga masyarakat suku-suku bangsa yang berbeda-beda, di mana masing-masing suku-bangsa memiliki tata nilainya sendiri, yang tentu saja berbeda satu dengan yang lainnya. Meskipun demikian, keseluruhan masyarakat Indonesia berada di kawasan Asia Tenggara, yang secara klasifikatoris dicirikan menganut filosofi Timur, yang mengutamakan kepaduan kolektif, dan jika meminjam terminologi Durkheim, ini dicirikan sebagai solidaritas mekanis (dikutip Morris, 1987: 107), sehingga, adanya aneka ragam yang berbeda-beda pada tingkat perilaku praktis di antara suku-suku bangsa itu, bukan berarti tiadanya kesamaan pada *level* yang lebih hakiki.

Nilai budaya juga merupakan bagian dari konsepsi-konsepsi di tingkat hakiki ini. Jika diamati secara cermat, akan dapat ditemukan sejumlah persamaan pola tata tingkah laku warga suku-suku bangsa di Indonesia, misalnya saja, masyarakat-masyarakat di Indonesia mengenal pola kerja bersama yang secara umum dikenal sebagai *gotong-royong* (lihat Kartodirjo, 1978). Sekalipun ada perbedaan variasi sistem kerjanya, ternyata terdapat kesamaan keserasian pola tata kerja bersama mereka.

Nilai budaya keserasian hidup bersama itu sesungguhnya telah berabad-abad menjadi filosofi dasar masyarakat Jawa, yaitu suatu cita-cita yang berupa “tatanan sosial terorganisasi secara rapi dan dalam keseimbangan” (Leach, dikutip Kuper, 1991:156). Kehidupan masyarakat terorganisasi secara rapi dalam masyarakat Jawa tercermin dalam nilai-nilai budaya *hormat* dan *rukun*, dan konsep keseimbangan tercermin dalam terjaminnya pemerataan distribusi kesempatan dan sumber daya ekonomi, sosial, politik dan budaya secara adil, serta terpeliharanya hubungan selaras dengan lingkungan alam. Dalam konteks ini, keseimbangan yang harus dijaga adalah “tata tertib kosmos agar jangan sampai terganggu” (Lombard, 1996 (3): 132).

Keserasian Hidup, Nilai Budaya Jawa

Jika dicermati sistem pengendalian sosial di Jawa yang utama adalah menempatkan masyarakat beserta perangkat adat-istiadatnya secara dominan yang menentukan arah perilaku individu-individu warganya. Otonomi individu beserta penampilan kepribadiannya memainkan peran agak sekunder. Kepentingan individu diserasikan secara harmonis dengan kepentingan kolektif atau masyarakat keseluruhan. Masyarakat Jawa dikategorikan dalam sistem budaya yang mengutamakan nilai keserasian hidup kolektif. Institusi sosial ada atau diadakan agar berfungsi untuk memainkan peran yang berkontribusi kepada kepaduan formasi keseluruhan masyarakat yang utuh. Kebutuhan-kebutuhan individu dengan sendirinya akan terpenuhi langsung terkait dengan berfungsinya lembaga-lembaga sosial itu.

Perwujudan dari nilai keserasian hidup dapat dilihat dalam praktek kerja bersama yang populer disebut *gotong-royong*. Kerukunan semacam ini didasari oleh “empat sifat dasar manusia, yakni: simpati, keramahan, rasa keadilan, dan kepentingan pribadi yang selaras dengan tatanan sosial menurut adat-istiadat” (Martindale, 1978: 46). Dengan demikian, konsep keserasian hidup bermasyarakat di Jawa diwujudkan dalam nilai-nilai hormat dan rukun. Dalam konstelasi hidup serasi di mana “setiap orang harus berikhtiar untuk bertindak sesuai, cocok, selaras, seirama dengan teladan yang telah diterapkan” (Lombard, 1996(3): 129).

Berdasarkan cara berfikir tertentu, manusia Jawa memandang nilai hormat dan rukun memiliki makna amat penting dan berharga dalam hubungan interaksi dengan sesamanya. Hildred Geertz (1985: 151) menyatakan bahwa “kedua-duanya bukan saja merupakan petunjuk moral yang mendasari tindak-tanduk kekeluargaan Jawa, melainkan malah merupakan pusat pengertian baginya. Yang pertama ialah sekelompok nilai yang berkenaan dengan pandangan *Kejawen* tentang tata krama penghormatan, dan yang kedua nilai-nilai yang berkenaan dengan pengutamaan orang Jawa terhadap terpeliharanya penampilan sosial yang harmonis”.

Lebih jauh dijelaskan, bahwa “keadaan rukun berarti semua orang dan semua pihak berkeinginan dan bertindak ke arah suasana damai, saling membantu

dan bekerja sama, saling menerima dengan tenang dan sepakat” (Magnis-Suseno, 1988: 38). Rukun adalah suasana yang dicita-citakan dan diharapkan dapat dipertahankan dalam semua hubungan-hubungan sosial seperti dalam keluarga, kelompok, komunitas kampung, desa, dan kota. Hubungan interaksi itu harus didasari dengan sikap hormat sesuai dengan posisi sosial yang tepat. Ketika kedua nilai hormat dan rukun itu dapat dipraktekkan, maka ujung-ujungnya yang ingin dicapai adalah suasana harmonis, seimbang dan selamat, suatu keadaan yang diidealkan dan diupayakan, baik secara nyata melalui tidak-tanduk kongkret atas dasar prinsip nilai-nilai itu, maupun melalui praktek ritual religio-magis (*slametan*). Suasana selamat adalah keadaan psikologis berupa ketenteraman batin yang tenang. Semua proses itu dilandasi nilai-nilai luhur dalam ungkapan Jawa yang berbunyi: *sepi ing pamrih, rame ing gawe, memayu hayuning bawana*. Frans Magnis-Suseno mengartikannya sebagai “menjadi bebas dari kepentingan sendiri, melakukan kewajiban-kewajibannya, memperindah dunia” (1988: 38). Terjemahan ini memberikan tafsiran yang baik, tetapi bersifat kaku dan harafiah. Barangkali makna yang lebih tepat adalah “sebaiknya tidak mengutamakan kepentingan sendiri, dan giat rajin melakukan kewajiban, untuk memelihara ketenteraman masyarakat dan dunia”. Agar dapat menjalankan nilai luhur ini, menurut orang Jawa yang direformulasikan oleh Magnis-Suseno (1988: 139 -159) orang harus melalui dalil empat sikap: (1) sikap batin yang tepat, (2) tindakan yang tepat, (3) tempat yang tepat, dan (4) pengertian yang tepat.

1. Sikap batin yang tepat

Sikap batin yang tepat, dapat diartikan sebagai cara berfikir yang benar, direalisasikan melalui perilaku *mawas diri*, yaitu sikap batin untuk introspeksi tentang keadaan diri individu itu sendiri. Hasilnya ialah sikap manusia Jawa yang *waspada*, suatu keadaan yang selalu siap menghadapi segala sesuatu yang mungkin terjadi, dan kondisi *eling*, ialah keadaan selalu ingat akan keberadaan dirinya sebagai makhluk ciptaan Tuhan. Orang Jawa wajib selalu sadar dari mana asal-usul dirinya, kewajiban apa yang harus dilakukan, dan ke mana arah tujuan hidupnya (*sangkan paraning dumadi*).

Godaan untuk mempertahankan sikap *eling* dan *waspada* adalah bekerjanya dorongan nafsu-nafsu naluriah dan sikap egoisme atau keinginan pribadi (*pamrih*). Nafsu-nafsu naluriah atau kebutuhan jasmaniah secara normal dan menurut etika Jawa wajib dipenuhi, agar manusia tetap hidup dan dapat mengembangkan diri dan jenisnya, agar mampu menjalankan kewajibannya. Sementara itu, *pamrih* adalah keinginan-keinginan untuk memenuhi kebutuhan jasmaniah dan kehendak memiliki sarana-sarana penunjang pemenuhan itu. Sepanjang upaya-upaya pemenuhan keinginan naluriah itu berada dalam batas rambu-rambu keseimbangan, upaya itu tidak menyebabkan gangguan dan kekacauan sosial. Akan tetapi, ketika upaya demikian melampaui batas nilai budaya itu, batin manusia mulai kacau, masyarakat mulai teracau ketertibannya. Situasi masyarakat Indonesia kini mencerminkan keadaan seperti ini.

Dorongan-dorongan jasmaniah dan *pamrih*, menurut nilai budaya Jawa, tidak perlu dilenyapkan, tetapi dijaga keseimbangan pemenuhannya. Ungkapan *sepi ing pamrih*, bukan berarti melenyapkan keinginan-keinginan pribadi individu, melainkan orang jangan sampai memperbesar keinginan melebihi kemampuannya, lebih-lebih menginginkan sesuatu yang bukan haknya. Pengendalian efektif untuk upaya itu ialah *mawas diri* dan *laku tirakat*, yaitu “sekedar laku *tapa* sedikit: mengurangi makan dan tidur, menguasai diri di bidang seksual” (Magnis-Suseno, 1988: 139), serta mengendalikan letupan emosi, dan mengatur tutur kata. Upaya-upaya mawas diri ini akan menjadi lebih sempurna, jika disertai dengan sikap: *sabar, nrima, temen, rila, dan budiluhur*.

2. Tidakan yang tepat

Sikap batin yang tepat menentukan tindakan yang tepat. Tindakan yang tepat adalah perwujudan dari ungkapan *rame ing gawe* atau *dharma*, yang berarti rajin bekerja menjalani kewajiban untuk kepentingan keseluruhan masyarakat, yaitu: bagi diri sendiri, keluarga, masyarakat dan kesejahteraan manusia pada umumnya. Manakala banyak orang telah mampu mawas diri, artinya memiliki sikap batin yang tepat, dengan sendirinya orang itu telah bekerja menjalankan kewajibannya. Orang-orang demikian dapat dipandang berada di tempat yang tepat dalam struktur kosmos. Dalam konteks ini, orang dituntut melakukan tidak-

tanduk sesuai dengan kedudukan yang ditempati itu, dan juga setiap orang dituntut mampu menempatkan diri secara tepat dalam struktur hubungan-hubungan masyarakat. Kondisi yang diharapkan adalah keserasian hidup bermasyarakat dan tatanan kosmos.

3. Tempat yang tepat

Begitu manusia Jawa mampu bertindak secara benar berarti ia telah memenuhi kewajiban tugas hidupnya. Tindak-tanduk yang dilakukan itu merupakan kewajiban yang ditentukan oleh posisi sosial yang ia tempati. “Diharapkan setiap orang memenuhi *dharmanya* dengan setia demi kesejahteraan masyarakat, demi pemeliharaan keselarasan kosmos, dan demi mencapai ketenteraman batin” (Magnis-Suseno, 1988: 152). Menjalankan *dharma* seperti itu, berarti sekaligus *memayu hayuning bawana*, yang secara tersirat bermakna menyelamatkan ketertiban dan ketenteraman masyarakat, serta berarti memelihara tatanan kosmos.

4. Pengertian yang tepat

Pengertian yang tepat berkenaan dengan kemampuan manusia memahami bagaimana ia harus bersikap batin yang tepat, bagaimana ia harus bertindak yang benar, dan di mana ia harus menempatkan diri secara tepat dalam struktur hubungan-hubungan sosial dan keselarasan lingkungan alam. “Siapa yang mengerti tempatnya dalam masyarakat dan dunia, dia juga mempunyai sikap batin yang tepat dan dengan demikian juga akan bertindak dengan tepat. Sebaliknya, siapa yang membiarkan diri dibawa oleh nafsu-nafsu dan pamrihnya, yang melalaikan kewajiban-kewajibannya dan acuh tak acuh terhadap rukun dan hormat, dengan demikian memberi kesaksian bahwa ia belum mengerti tempatnya secara keseluruhan” (Magnis-Suseno, 1988: 156). Ia belum memiliki pengertian yang tepat.

Persoalan yang timbul kini adalah bahwa gambaran ideal filosofis itu ternyata terusik oleh globalisasi dan situasi krisis multidimensi di Indonesia. Maka untuk memperkuat daya tahan moral dan akhlak bangsa, perlu ditekankan jika nilai budaya di atas dapat direvitalisasi dan diintegrasikan dalam konstelasi

struktur budaya nasional. Konsepsinya dapat dirumuskan melalui cara reinvensi tradisi, dan sosialisasinya dapat dilakukan melalui pendidikan budi pekerti dan lewat pentas seni wayang kulit.

Pentas Wayang Sumber Tata Nilai Keserasian Hidup

Ward Keeler (1987: 203) mengkaitkan aspek-aspek pentas wayang purwa dengan konsepsi jati diri orang Jawa, sebagai direfleksikan dalam kedudukan sosial dan dalam kedudukan relatif pergaulan sosial. Pentas wayang adalah refleksi simbolis hubungan-hubungan sosial horisontal dan vertikal. Dalam konteks hubungan horisontal, pentas wayang ini menyiratkan tata nilai yang menunjukkan upaya-upaya untuk mencapai keserasian hidup. Keadaan ideal yang wajib dipertahankan itu berupa keseimbangan tata tertib sosial yang digambarkan sebagai suatu masyarakat yang tenteram, makmur, aman, dan adil. Idiom-idiom ini kini juga menjadi amanat yang dicita-citakan dalam pembangunan nasional. “Konsep keseimbangan itu amat penting dan betul-betul membayangi alam pikiran semua orang Jawa, sehingga selalu muncul dalam wacana para *dhalang*. Setiap pertunjukan dimulai dengan deskripsi stereotip mengenai kerajaan idaman yang dikatakan subur, kaya dan berpenduduk banyak, dengan tekanan khusus pada kestabilan, ketertiban, dan ketenteramannya” (Lombard, 1996 (3): 132).

Pentas wayang semalam suntuk, sesungguhnya merupakan simbolisasi dari keberadaan diri individu manusia Jawa itu sendiri, berkaitan dengan asal-usul hidupnya, yang dipersepsikan sebagai berasal dari hakikat Ilahi. Pentas itu juga melambangkan keberadaannya dalam lingkungan sosial dan alamnya, yang direpresentasikan oleh komunitas penonton dan arena pentas wayangnya (lihat Soehardi, 1995). Jika konsepsi ini dapat berlaku, lakon-lakon yang setiap kali dimainkan merupakan suatu episode perjalanan seorang individu manusia. Lakon-lakon itu menggambarkan pertarungan batin dalam diri seseorang, yaitu antara dorongan keinginan berbuat dalam batas rambu-rambu nilai budaya atau cenderung mengabaikannya. Jika seseorang memiliki kecenderungan mengikuti tata nilai budaya yang didiskripsikan di atas, maka orang itu cenderung memilih bertindak-tanduk yang benar, yaitu berbuat yang bijak, jujur, sopan, penuh kasih sayang dsb. Namun sebaliknya, jika orang tersebut cenderung mengabaikannya,

dengan ringan ia akan berbuat jahat kasar, curang, serakah, dan mengobarkan kebencian kepada pihak yang ia anggap merugikan kepentingannya. Pertentangan batin dalam pikiran manusiayaitu pertentangan antara sifat-sifat baik melawan sifat yang tidak baik ini disimbolisasikan dalam bentuk pertentangan antara tokoh-tokoh *wayang tengen* melawan *wayang kiwa*. Hal ini seirama dengan yang dinyatakan oleh Seno Sastroamidjajo (tt: 164) “pertunjukan wayang kulit merupakan lambang perjuangan batin antara prinsip baik dan prinsip buruk di dalam kehidupan manusia pada umumnya”. Pernyataan ini menyiratkan, bahwa nilai-nilai filosofis yang terkandung di dalam pentas wayang memiliki nilai universal, artinya dapat berlaku secara umum bagi siapa saja di dunia ini. Pentas wayang kulitnya adalah khas Jawa atau Indonesia, tetapi kandungan nilai filosofisnya adalah nilai kemanusiaan yang universal. Dengan sendirinya, maka nilai-nilai budaya itu tentu saja dapat diberlakukan bagi manusia-manusia masyarakat di Indonesia.

Dalam konteks itu, prinsip-prinsip nilai baik dan bijak divisualisasikan dengan wayang *tengen* karena dalam wacana pertarungannya diposisikan di tangan kanan sang *dhalang*, dan tokoh-tokoh wayang dalam faksi ini menggambarkan sifat halus, baik dalam profil maupun tidak-tanduk mereka. Ciri ini mengindikasikan bahwa tokoh-tokoh itu telah memiliki derajat pengertian yang tepat, sikap batin yang tepat, tindakan yang tepat, dan tempat yang tepat. Mereka menjadi suri teladan bagi orang Jawa, bahkan diharapkan bagi orang Indonesia atau manusia pada umumnya. Di arena pertempuran manapun, pada akhirnya, faksi wayang *tengen* mengungguli tokoh-tokoh wayang *kiwa*. Sifat-sifat yang halus dan bijak selalu mengatasi yang kasar dan jahat. Faksi wayang *kiwa* diposisikan di tangan kiri *dhalang*, yang menggambarkan simbolisasi watak kasar, jahat, dan kurang ajar sebagai pernyataan sifat kurangnya pengertian yang tepat, sikap batin yang tepat, tindakan yang tepat, dan tempat yang tepat. Kontras watak halus berhadapan dengan watak kasar disimbolisasikan oleh tokoh-tokoh Pandawa dengan tokoh Korawa dalam epik *Mahabharata*, dan tokoh Rama melawan tokoh Rahwana dalam epik *Ramayana*. Simbolisasi semacam ini juga divisualisasikan dalam adegan perang kembang yakni: pertarungan antara tokoh ksatria melawan raksasa.

Perang kembang dapat dipakai sebagai ilustrasi faktual yang mengesankan. Dalam pentas wayang kulit, perang kembang bagian dari babak kedua, yang diawali dengan adegan *gara-gara* (lihat Soehardi, 1996: 18 - 19). Babak *gara-gara* ini menandai dunia dalam keadaan kegoncangan, yang disebabkan karena ada seorang ksatria yang sedang bersedih dan bekelana di hutan untuk mencari ketenteraman batin, atau untuk bertapa, atau dalam perjalanan menuju ke pertapaan pendeta untuk berguru. Ksatria ini adalah seorang anak muda yang rupawan, seperti Permadi putra Pandawa yang ketiga. Dalam perjalanan itu, ksatria ini selalu diiringi oleh empat pelayan, yakni: Semar, Gareng, Petruk, dan Bagong. Selama perjalanan itu, empat pelayan itu selalu bikin ulah dengan mementaskan *banyolan*, untuk menghibur sang ksatria yang sedang bersedih. Akan tetapi yang sebenarnya banyolan itu dikonsumsi bagi penonton pentas wayang tersebut. Ketika mereka sedang asyik bersendau-gurau, tiba-tiba mereka diserang oleh bala tentara raksasa yang dipimpin oleh tiga orang raksasa, yakni: Cakil, seorang raksasa ceking berwajah warna kuning, dan yang bertindak sebagai komandan perang, diikuti oleh dua orang raksasa lainnya yang berwajah warna merah dan hitam. Pasukan tentara raksasa ini selalu diikuti dua orang pelayan bernama Togog dan Sarawita.

Kemudian timbul negosiasi antar kedua belah pihak untuk memperebutkan jalan, di mana pasukan raksasa sebagai penjaga tapal batas melarang sang ksatria menerobos masuk ke dalam wilayah kekuasaan pasukan raksasa. Akan tetapi, watak ksatria tidak dapat ditundukkan begitu saja, dan tetap akan melanjutkan perjalanan, apapun rintangannya. Akibatnya, pertempuran tidak dapat dielakkan. Sesuai dengan, tipologi perang dalam pentas wayang, maka sang komandan Cakil yang terlebih dulu bertempur melawan sang ksatria. Cakil mendemonstrasikan permainan silat yang amat lincah, cepat dan gesit, cenderung kasar, diiringi lengkingan suara kecil dan tinggi. Gerakan silat itu dihadapkan dengan perlawanan sang ksatria dengan gerakan yang halus, pelan, tetapi penuh dengan kewaspadaan. Terbukti pukulan raksasa yang cepat dan gesit itu dengan mudah dapat dielakkan oleh sang ksatria. Sekalipun ada pula pukulan yang mengenai sasaran, tetapi itu tidak menggoyahkan posisi ksatria. Bahkan, akhirnya sang komandan raksasa ini terbunuh oleh kerisnya sendiri. Kedua raksasa lainnya pun

tidak mampu melawan sang ksatria, dan mereka tewas oleh kesaktian anak panahnya. Togog bersama Sarawita melarikan diri kembali ke kerajaan raksasa, dan nanti muncul kembali mengikuti raksasa berkarakter sejenis dalam lakon yang lain. Dengan berakhirnya pertempuran ini, berarti sang ksatria mampu menyingkirkan rintangan pertama untuk mencapai tujuan berikutnya, yaitu berguru, atau memperoleh petunjuk dewa.

Keunggulan tokoh yang halus atas yang kasar merupakan idealisme orang Jawa dalam rangka memelihara keseimbangan dan ketenteraman secara individu, yang kemudian diharapkan memancar ke dalam keluarga, masyarakat, serta tatanan kosmos. Sehubungan dengan itu, pentas wayang itu pada hakekatnya merupakan sumber nilai-nilai budaya *adiluhung* dan menjadi sumber filosofi hidup bagi orang Jawa. Pentas wayang dapat pula dipakai sebagai arena penyampaian pendidikan masyarakat dengan cara menyiarkan petuah-petuah budi pekerti dan suri teladan yang baik. Dalam kaitan ini, Denys Lombard (1996 :130) menyatakan bahwa: "...wayang, yang peranannya tidak terbatas pada ritual pensucian, tetapi juga -dan barangkali terutama- merupakan alat pedagogis yang sangat efektif".

Saratnya nilai *adiluhung* dan pentingnya peran dalam pembinaan karakter manusia, menjadikan tidak berlebihan jika pentas wayang pantas disosialisasikan bagi bangsa Indonesia, dalam upaya membangun budi pekerti bangsa, yang kini sedang mengalami erosi.

Kesimpulan

Nilai budaya daerah memang bersifat khas , memiliki cakupan berlaku terutama bagi pendukung kebudayaan tertentu. Sifat khas pada umumnya terletak pada tataran praktis yang konkret yang berwujud tindak-tanduk nyata. Dibalik yang kongkrit itu terkandung nilai-nilai etika moral dan filosofi yang universal. Ungkapan Jawa, *sepi ing pamrih rame ing gawe, memayu hayuning bawana* ini menyiratkan nilai-nilai keserasian hidup bermasyarakat, baik lingkungan hidup sesama manusia, maupun dengan lingkungan alamnya. Prinsip ini tentu saja dapat dipakai sebagai anutan dan tuntunan hidup bangsa Indonesia. Keserasian hidup

menyiratkan suasana rukun dan saling menghormati sesama manusia yang membentuk struktur masyarakat Indonesia.

Dalam konteks ini, setiap orang, setiap kelompok seyogyanya berikhtiar untuk bertindak yang selaras, seirama dan tepat seperti yang diteladankan oleh para ksatria dalam pertunjukan wayang. Sosialisasi nilai-nilai budaya ini secara nasional, diharapkan dapat menangkal keresahan-keresahan sosial yang akhir-akhir ini melanda masyarakat, sebagai akibat dari krisis ekonomi, politik, sosial yang menjaral menjadi konflik antar suku bangsa, antaragama dan antar aliran politik. Upaya yang perlu dilaksanakan adalah pendidikan budi pekerti untuk membangun karakter bangsa yang kini mengalami kemerosotan. Salah satu arena sosialisasi nilai budaya itu adalah lewat pertunjukan wayang sehingga nilai-nilai budaya daerah dan pentas wayang dapat berbicara dalam khazanah nasional dan sekaligus menjadi salah satu pembentuk jati diri bangsa.

Daftar Pustaka

- Geertz, Hildred.
1985 *Keluarga Jawa*. PT. Grafiti Press: Jakarta.
- Keeler, Ward.
1987 *Javanese Shadow Plays, Javanese Selves*. Princeton University Press: Princeton, New Jersey.
- Koentjaraningrat.
1969 *Rintangan-Rintangan Mental Dalam Pembangunan Ekonomi di Indonesia* Bhratara: Djakarta.
- Kartodirjo, Sartono.
1978 *Kedudukan dan Peranan Sistem Gotong-Royong Dalam Perkembangan Masyarakat Indonesia* Lembaga Studi Pedesaan dan Kawasan UGM: Yogyakarta.
- Kuper, Adam.
1991 *Anthropology and Anthropologists*. Routlegde: London and New York.
- Lombard, Denys.
1996 *Nusa Jawa: Silang Budaya*. Jilid 3. Penerbit PT Gramedia Pustaka Utama: Jakarta.

- Magnis-Suseno, Franz.
1978 *Etika Jawa*. Penerbit PT Gramedia: Jakarta.
- Martindale, Don.
1978 "The Theory of Social Control", in *Social Control for 1980's, A Handbook for Order in a Democratic Society*. Edited by Josephs Roucek, Greenwood Press: Westport, London, (pp. 46 - 58).
- Morris, Brian.
1987 *Anthropological Studies of Religion, An Introductory Text*. Cambridge University Press: Cambridge, London, New York.
- Sastroamidjaja, Seno.
1967 *Renungan Tentang Pertunjukan Wayang Kulit*. Penerbit PT Kinta: Djakarta.
- Soehardi.
1995 *Magna Pertunjukan Wayang Purwa, Suatu Kajian Antropologi Simbol*. Laporan Penelitian tidak terbit. Fakultas Sastra UGM: Yogyakarta.
-
- 1996 "Jati Diri Semar, Konteks Pakeliran dan Kosmologi Jawa", dalam *Bulletin Antropologi* Th. XI. No. 2o, hal. 11 - 24, Yogyakarta.